

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
PT. KALBE FARMA, Tbk
TENTANG
KONSINYASI IOL RAYONE
NOMOR : 133 /PKS/DIR/RSMU/XII/2021
NOMOR : 1112/PKS/DIR/RSMU/KF-VSN/2021**

Pada hari ini, Sabtu tanggal 11 (Sebelas) **Desember** Tahun **2021** (dua ribu dua puluh satu), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M (K)**, menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA** berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tanggal 23 (duapuluh tiga) Oktober 2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dan Surat Kuasa Perhimpunan Penderita Penyakit Mata Undaan Surabaya Nomor: 100/P4MU/KBP/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama Perhimpunan Perawatan Penyakit Mata Undaan, selaku pemilik Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor dari 17-19 Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 530/01/436.9.7.5/2021. Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
2. **Mikhael Chrestian, S.Kom**, menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya sebagai Regional Sales Manager **PT. KALBE FARMA, Tbk** yang Anggaran Dasarnya termuat dalam Akta Pembukaan Kantor Cabang dan Pemberian Kuasa, No. 004/KF-SK/VSN/I/2021, tanggal 01-10-2021, yang dibuat di internal PT. Kalbe Farma, Tbk,. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas **PT. KALBE FARMA, Tbk**. Selanjutnya disebut sebagai: "**PIHAK KEDUA**".

-- Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kapasitasnya masing-masing di atas, terlebih dahulu dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara Layanan Kesehatan Khusus Mata, berdasarkan Surat Izin Operasional Rumah Sakit Nomor: P2T/2/03.23/02/III/2018 tertanggal 20 Maret 2018;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu pedagang besar farmasi yang memenuhi syarat-syarat pendistribusian obat, bahan obat, alat kesehatan, reagensia, dan gas medik dengan baik, pemegang Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur yang memberikan pelayanan obat dan/atau produk farmasi untuk memenuhi kebutuhan pasien dan sarana pengobatan di sarana **PIHAK KESATU**.

Berdasarkan kepada :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1988 tentang Pengamanan Perbekalan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

**PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. KALBE FARMA, Tbk**

Page 1 of 12

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi;
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit.

PARA PIHAK telah mengikat dan setuju untuk mengikatkan diri membuat perjanjian kerjasama penyediaan Intra Ocular Lens dengan sistem konsinyasi dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
DEFINISI**

1. Alat Kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
2. Intra Ocular Lens (selanjutnya disebut dengan "IOL") adalah lensa buatan yang akan digunakan dalam operasi katarak untuk mengganti lensa alami yang sudah keruh, dengan jenis-jenis sebagai berikut: a. IOL Monofocal; b. Torric; C. Multifocal
3. Sistem Konsinyasi adalah bentuk kerjasama penjualan antara pemilik barang, dalam hal ini **PIHAK KEDUA** dengan pemilik tempat, dalam hal ini **PIHAK KESATU** dengan cara menitipkan produk untuk dijual;
4. Keadaan kebijakan barang atau retur untuk objek perjanjian karena hal-hal seperti rusak saat proses pengiriman, cacat manufaktur pada saat proses produksi, penarikan kembali produk oleh pihak berwajib, tanggal kadaluarsa serta IOL yang batal digunakan karena keadaan baik dalam keadaan steril maupun unsteril dan tidak akan ditagihkan khusus IOL yang batal tersebut.
5. Hari adalah hari kerja yang berlaku di **PIHAK KESATU** yaitu Senin sampai dengan Sabtu.
6. Jam adalah jam kerja yang berlaku di **PIHAK KESATU** yaitu:
 - a. Senin-Jum'at pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 - b. Sabtu pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.



**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dan tujuan dari perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan perjanjian kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam Penyediaan IOL dengan sistem konsinyasi.
- (2) **PARA PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan Penyediaan IOL dengan sistem konsinyasi yang digunakan bagi pasien yang dirawat di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

**PASAL 3
OBJEK PERJANJIAN**

- (1) Objek yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah IOL yang di distribusikan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mendukung kegiatan yang dilakukan di tempat **PIHAK KESATU**.

**PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. KALBE FARMA, Tbk**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) IOL yang akan disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang terlampir pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 4
RUANG LINGKUP**



Perjanjian ini meliputi Pemesanan, Penyaluran, Penerimaan, dan Penyimpanan objek perjanjian.

**PASAL 5
MUTU DAN KEAMANAN**

- (1) Produk yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan atau keamanan, kemanfaatan, serta orisinalitas yang didukung oleh dokumen seperti sertifikat orisinalitas dan/atau penunjukan distributor resmi, nomor produksi dan nomor izin edar, serta untuk bahan berbahaya harus menyertakan *Material Safety Data Sheet* (MSDS).
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan jaminan bahwa produk yang dijual dan diserahkan dalam keadaan baik, tidak terdapat cacat fisik sedikit pun, tidak kadaluarsa (minimal 3 tahun dari tanggal kadaluarsa) dan dalam kemasan asli dari pabrik yang bersangkutan.
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan jaminan keabsahan produk dengan memberikan dokumen berupa surat penunjukan produk yang disahkan adalah produk resmi dan telah terdaftar di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).
- (4) Semua pihak yang terlibat dalam proses penyebaran atau distribusi harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*due diligence*).

**PASAL 6
PERUBAHAN**

- (1) Semua perubahan yang ada pada produk yang berasal dari *principle* atau **PIHAK KEDUA** wajib diinformasikan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Perubahan yang dimaksud pada ayat (1) yang merupakan perubahan minor, meliputi:
 - a. perubahan besar kemasan;
 - b. Perubahan designkemasan.
- (3) Perubahan yang dimaksud pada ayat (1) yang merupakan perubahan mayor, meliputi:
 - a. Perubahan informasi produk atau penandaan berdasarkan keputusan pemerintah;
 - b. Formula perubahan atau perubahan (penambahan dan pengurangan) zat aktif;
 - c. Perubahan (penambahan atau pengurangan) indikasi;
 - d. Perubahan tanggal kadaluarsa,
 - e. Perubahan nama industri (pabrikasi atau manufaktur),
 - f. Perubahan nama dagang;
 - g. Perubahan sistem kemasan primer;
 - h. Perubahan isi atau jumlah kemasan.
- (4) Pemberian informasi terkait perubahan minor dan mayor seperti yang telah ditentukan dalam ayat (2) dan (3) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** minimal 60 (enam puluh) hari sebelum terjadinya perubahan kepada **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 7
PENANGGUNG JAWAB

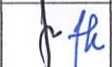

- (1) **PARA PIHAK** akan saling memberikan informasi mengenai penanggung jawab untuk pengadaan, pengiriman, penerimaan, penyimpanan dan penarikan kembali produk, yang mana penanggung jawab tersebut harus merupakan:
 - a. Karyawan dari **PARA PIHAK**;
 - b. Karyawan tersebut harus memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dan diperlukan;
 - c. Tersedianya karyawan yang kompeten untuk memastikan, baik proses penyebaran, mutu produk dan keamanan tetap terjaga;
 - d. **PARA PIHAK** wajib dikaitkan dengan adanya perubahan karyawan.
- (2) Karyawan penanggungjawab dari **PARA PIHAK** adalah sebagaimana tercantum di dalam Pasal 14 Perjanjian ini.

PASAL 8
PENGIRIMAN, PENYERAHAN DAN PENERIMAAN PRODUK

- (1) **PIHAK KEDUA** menyiapkan dan mengirimkan produk yang berjumlah 32 lensa dengan range power +15.0D sampai +22.5D dengan kelipatan 0,5 Dipotri sesuai dengan surat pesanan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**;
- (2) **PIHAK KEDUA** mengirimkan dan menyerahkan produk kepada **PIHAK KESATU** dengan kadaluwarsa produk tidak kurang dari 3 (tiga) tahun;
- (3) **PIHAK KEDUA** mengirimkan dan menyerahkan produk kepada **PIHAK KESATU** tidak lebih dari 2 (dua) hari sejak pesanan diinfokan atau diterima oleh **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PIHAK KEDUA** mengirimkan dan menyerahkan produk kepada **PIHAK KESATU** hanya pada jam kerja saja;
- (5) Dalam hal stok produk yang dipesan oleh **PIHAK KESATU** kosong, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk menyediakan produk tersebut maksimal 1 (satu) minggu setelah pesanan dari **PIHAK KESATU** diterima;
- (6) Dalam hal tidak dapat dilaksanakannya ketentuan di dalam ayat (3) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk menginformasikan kepada **PIHAK KESATU** terkait penundaan pengirimannya.
- (7) Dalam proses penyiapan dan pengiriman produk, **PIHAK KEDUA** wajib menjaga menjaga kualitas produk dengan menyesuaikan kondisi dan persyaratan penyimpanan dan distribusi selama pengiriman sesuai dengan yang dipersyaratkan dan yang ditetapkan pada kemasan informasi produk tersebut.
- (8) Khusus untuk IOL yang cacat/rusak atau tidak sesuai dengan pesanan, **PIHAK KESATU** wajib melapor pada **PIHAK KEDUA** paling lambat 2x24 jam (tidak termasuk hari libur), apabila terdapat IOL dari **PIHAK KEDUA** yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. IOL yang dilaporkan rusak atau tidak sesuai dengan pesanan tersebut akan diambil kembali oleh **PIHAK KEDUA** untuk ditukarkan ke yang baru atau sesuai pesanan tanpa memasukkannya ke daftar tagihan/atau penggunaan.
- (9) **PIHAK KEDUA** mengirimkan atau menyerahkan produk kepada **PIHAK KESATU** disertai dengan dokumen pelengkap berupa faktur dan harus mencakup sedikitnya dokumen berikut:
 - a. Nama dan alamat, nomor telepon dan status dari pengirim (**PIHAK KEDUA**) dan penerima (**PIHAK KESATU**);
 - b. Tanggal pengiriman;
 - c. Deskripsi produk yang mencakup: nama produk, bentuk sediaan, isi kemasan dan dosis;
 - d. Nomor batch dan tanggal kadaluarsa;

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. KALBE FARMA, Tbk

Page 4 of 12

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- e. Jumlah yang diserahkan terimakan;
 - f. Nomor dokumen atau faktur;
 - g. Harga;
 - h. Tanda tangan dan nama pengirim pengirim (**PIHAK KEDUA**) dan penerima (**PIHAK KESATU**);
 - i. Dalam hal belum dapat diterbitkan faktur karena sesuatu dan hal lain maka **PIHAK KEDUA** dapat mengirimkan penggantian faktur dengan dokumen lain berupa surat tanda terima yang harus diganti lebih dari 3 (tiga) hari.
- (10) **PIHAK KESATU** wajib menempatkan dan menjaga IOL yang dititipkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan sebaik-baiknya;

PASAL 9
PELAPORAN PEMAKAIAN DAN STOCK OPNAME IOL

- (1) **PIHAK KESATU** wajib melaporkan pemakaian IOL dengan cara mengirimkan foto stiker yang terdapat pada kemasan IOL melalui email atau fax setiap minggunya;
- (2) **PIHAK KESATU** wajib memberikan tanggapan atau umpan balik atas laporan sisa stok konsinyasi yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** setiap bulannya dalam jangka waktu 7x24 jam setelah laporan diterima oleh **PIHAK KESATU**. Jika **PIHAK KESATU** tidak memberikan tanggapan atau umpan balik sampai dengan jangka waktu yang ditentukan maka, **PIHAK KESATU** dianggap menyetujui perkiraan laporan sisa IOL tersebut;
- (3) **PIHAK KESATU** wajib menerima dan membantu petugas **PIHAK KEDUA** yang akan melakukan *stock opname* IOL di lokasi **PIHAK KESATU** setiap bulannya;
- (4) Jika terdapat selisih selisih, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk melakukan penagihan barang atas selisih tersebut;
- (5) **PIHAK KESATU** berhak untuk menolak petugas **PIHAK KEDUA** yang datang ke tempatnya tanpa membawa surat tugas resmi dan formulir *stock opname*,

PASAL 10
HARGA



- (1) Harga obyek perjanjian ini terlampir dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dalam jangka waktu Perjanjian ini terdapat perubahan harga dan potongan harga barang dalam Lampiran, **PIHAK KEDUA** wajib untuk menyampaikan kepada **PIHAK KESATU** paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum pemberlakuan harga baru oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila tidak ada pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK KESATU** berhak untuk tetap menggunakan harga lama.

PASAL 11
TATA CARA DAN JANGKA WAKTU PENAGIHAN

- (1) **PIHAK KEDUA** melakukan penagihan kepada **PIHAK KESATU** dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat permintaan pembayaran;
 - b. Kuitansi asli dibubuhi stempel secukupnya;

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. KALBE FARMA, Tbk

Page 5 of 12

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Rekapitulasi biaya dilampirkan dengan detail produk.
- (2) **Penagihan** dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** paling lama 30 (tiga puluh hari) setelah pelaporan penggunaan IOL dikirimkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - (3) **Khusus** untuk transaksi billing akhir tahun apabila transaksi dilakukan pada tanggal 16 (enam belas) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, maka invoice harus sudah diterima oleh **PIHAK KESATU** pada tanggal 5 (lima) Januari tahun berikutnya.
 - (4) Dalam hal tagihan tidak disertai dengan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KESATU** akan menunda pembayaran dan mengembalikan dokumen tagihan sampai dengan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - (5) Tagihan penggunaan IOL dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dengan rincian alamat pengiriman sebagai berikut:

<p>Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, 60274 No telp : (031)-5343806 ext. 4502 U.p : Bag. Keuangan</p>
--

PASAL 12
TATA CARA DAN PERIODE PEMBAYARAN

- (1) Faktur yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** akan dibayar oleh **PIHAK KESATU** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah faktur diterima oleh **PIHAK KESATU** dalam keadaan lengkap.
- (2) Pembayaran atas tagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** via transfer dengan biaya administrasi pada saat pembayaran menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan akan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut.
- (3) Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer pada rekening:



<p>NAMA : PT. Enseval Putera Megtrading, Tbk BANK : Bank Central Asia (BCA) NO. REK : 4683814060</p>

PASAL 13
ADDENDUM DAN SIDE LETTER

- (1) Apabila ada hal-hal yang memerlukan perubahan/penambahan klausul yang bersifat prinsip/dasar, maka salah satu pihak yang merasa perlu tersebut wajib untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, untuk kemudian di buatkan Addendum setelah **PARA PIHAK** sepakat.
- (2) Dalam hal perubahan/penambahan klausul yang bersifat tidak prinsip/dasar maka perubahan tersebut cukup dalam bentuk *Side Letter*.

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. KALBE FARMA, Tbk

Page 6 of 12

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 14
KORESPONDENSI

- (1) Surat menyurat, pemberitahuan, pernyataan dan/atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan dialamatkan pada:

PIHAK KESATU

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon 17-19 Peneleh, Genteng, Kota Surabaya
Telp : (031) 5343806
Fax : (031) 5317503
Nama : Intan Kusumawati, S.Farm.Apt., MARS
Jabatan : Ka. Instalasi Farmasi
Telp : 0811 3225 988
Email : farmasi@rsmataundaan.co.id
Web : www.rsmataundaan.com

PIHAK KEDUA

PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk
Jl. Nambangan No.34,36,38, Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya 60129
Telp : (031) 51506000
Fax : (031) 51506001
Spv : Sungkowo Budi
Email : sungkowo.budiyanto@enseval.com
Web : www.enseval.com



- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari itu juga dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

PASAL 15
CONTINUITAS PRODUK

- (1) *Principle* melalui **PIHAK KEDUA** memberikan jaminan kepada **PIHAK KESATU** bahwa produk yang diberikan kepada **PIHAK KESATU** dapat dilayani atau di *supply* dalam periode tertentu.
- (2) Produk yang akan dihentikan atau akan berhenti diproduksi oleh *principle* yang menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai distributornya, maka **PIHAK KEDUA** harus memberikan informasi kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari semenjak informasi itu diterbitkan.
- (3) Produk yang akan dihentikan atau akan berhenti diproduksi oleh *principle* yang telah pasti atau dalam waktu yang tidak dapat ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk memberikan informasi secara tertulis pada **PIHAK KESATU**.

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. KALBE FARMA, Tbk

Page 7 of 12

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 16
JAMINAN RETUR ATAU RECALL



- (1) Produk yang ditemukan rusak pada saat proses penyiapan, dan/atau penerimaan dapat dikembalikan dan dibawa kembali oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** wajib melaporkan IOL yang akan kadaluarsa (kedaluwarsa) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Jika terdapat IOL yang akan kadaluarsa namun tidak dilaporkan oleh **PIHAK KESATU**, maka retur tidak akan diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Produk yang tidak sesuai dengan surat pesanan, maka pada saat proses penyiapan, saat dan/atau penerimaan dapat langsung dibawa dan dibawa kembali oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** akan memberikan kebijakan atau *policy* retur produk kepada **PIHAK KESATU** yang berisi kebijakan atau tanggal kadaluarsa kebijakan retur produk dari *principle*.
- (5) Bila terjadi perubahan dalam kebijakan atau *policy* retur produk expired date dari *principle*, maka pihak *principle* melalui **PIHAK KEDUA** wajib untuk mensosialisasikannya dalam waktu minimal 90 (sembilanpuluh) hari sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**.
- (6) Produk yang di-retur, akan dipertimbangkan sebagai pengurangan belanja **PIHAK KESATU** sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 17
IDENTIFIKASI, KUNJUNGAN LAPANGAN DAN EVALUASI

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk melakukan kunjungan lapangan dan evaluasi pada fasilitas **PIHAK KEDUA** serta mendokumentasikannya.
- (2) **PIHAK KESATU** berhak untuk mengambil contoh atau sampel apabila didapatkan adanya ketidaksesuaian dalam audit atau pada pelaksanaan di lapangan sebagai bahan penyelidikan, evaluasi dan tindak lanjut.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyetujui untuk memberikan hasil atau informasi kepada **PIHAK KESATU** mengenai hasil audit atau inspeksi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah di fasilitas dan sarana **PIHAK KEDUA** yang berhubungan dengan kegiatan yang berkaitan dengan objek perjanjian.

PASAL 18
INTEGRITAS DAN FRAUD

- (1) **PIHAK KEDUA** tidak memberikan janji atau tidak menjanjikan dan/atau tidak memberikan sesuatu kepada staf farmasi dan/atau staf lainnya tanpa sepengetahuan **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak akan menerima dan/atau menerima hadiah dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada atau **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 19
PENANGANAN KELUHAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Semua keluhan dan informasi lain tentang produk dan pelayanan yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**, harus ditinjau, diperiksa, serta dilaporkan kembali oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Jika ada salah satu pihak melakukan kesalahan terhadap kewajiban dan atas salah satu perjanjian ini, sehingga merugikan pihak lain maka pihak yang merasa dirugikan dapat menyampaikan keluhannya secara tertulis dan diberikan kepada pihak yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pihak yang merasa dirugikan sudah membuat dan/atau melaporkan secara tertulis maka pihak yang menerima keluhan tertulis wajib untuk memberikan penjelasan secara tertulis kepada pihak yang merasa dirugikan atau segera memperbaiki kesalahannya atau memperbaiki kesalahan yang terjadi.
- (4) **PARA PIHAK** berhak meninjau kembali Perjanjian ini apabila ternyata ditemukan pihak lain yang telah melakukan kelalaian tidak mengindahkan dan/atau tidak memperbaiki kelalaian dan telah diingatkan hingga sebanyak 3 kali berturut-turut telah memberikan surat keluhan secara tertulis kepada pihak lain merasa dirugikan.

PASAL 20
KERAHASIAAN



Seluruh informasi yang diberikan termasuk Perjanjian ini adalah rahasia, oleh karena itu keberadaan, ketentuan, dan syarat dalam Perjanjian ini, maupun segala informasi dan keterangan- keterangan, surat-surat, serta dokumen lainnya yang diberikan dan disampaikan berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya harus diperlakukan sebagai dokumen yang wajib dijaga kerahasiaannya.

PASAL 21
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau menunda pelaksanaan Kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak), dinyatakan biayanya, huru-hara pemogokkan umum, kebakaran dan bencana alam yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal Peristiwa *Force Majeure*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dilihat oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat-surat dari pejabat yang disebutkan, adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan sebaik-baiknya untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Jika keadaan memaksa/ *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau dilupakan oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. KALBE FARMA, Tbk

Page 9 of 12

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.

PASAL 22
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 (satu) **Desember 2021** (duaribu duapuluh satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) **November 2022** (duaribu duapuluh dua).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 hari atau lambat 30 hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal ini berakhir, pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari setelah menerima pemberitahuan perpanjangan waktu perjanjian. Jika tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara otomatis Perjanjian ini dianggap selesai.

PASAL 23
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
- a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 22;
 - b. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empatbelas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian diterima dari pihak yang dirugikan;
 - c. Izin usaha atau operasional **PARA PIHAK** dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan izin usaha atau operasional Pihak atau izin praktik yang bersangkutan oleh pemerintah atau asosiasi profesi;
 - d. **PIHAK KEDUA** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan.
 - e. **PIHAK KEDUA** mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pihak yang bersangkutan dinyatakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis minimal 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari kalender setelah menerima pemberitahuan tersebut. tidak terdapat jawaban yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut menyatakan setuju dan setuju untuk menyetujui perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) **PARA PIHAK** setuju untuk melaksanakan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai pemutusan perjanjian ini serta Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (5) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang belum diselesaikan oleh pihak lain, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai selesainya kewajiban tersebut oleh pihak yang melaksanakannya.

**PASAL 24
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk saling memberikan surat teguran kepada satu pihak yang dianggap lalai dalam melaksanakan kewajibannya.
- (2) Jika timbul suatu permasalahan, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah.
- (3) Dalam waktu minimal 14 (empatbelas) hari, jika penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

**PASAL 25
MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK berhak melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perjanjian yang akan dilaksanakan secara berkala. Monitoring dan evaluasi diperlukan untuk menilai pelaksanaan perjanjian sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan atau kebijakan lebih lanjut mengenai perjanjian ini, dengan indikator sebagai berikut:


No.	Indikator	Target
1.	Barang yang dikirim tidak rusak/cacat.	100 %
2.	Penagihan faktur pembayaran <30 hari sejak barang terkirim.	100 %
3.	Proses retur barang apabila terjadi ketidaksesuaian/barang rusak dan/atau barang cacat.	100 %
4.	<i>Respond Time</i> penanganan masalah barang 1x24 jam.	100 %

**PASAL 26
LAIN-LAIN**

- (1) **Hak** dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali jika hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (2) **PARA PIHAK** dijelaskan dengan ini menyatakan kepastian identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa pernyataan ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan mewakili masing-masing. masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak.

**PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. KALBE FARMA, Tbk**

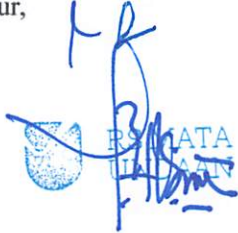
Page 11 of 12

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitulu, Sp.M (K)

PIHAK KEDUA,
Regional Sales Manager,



Mikhael Chrestian, S.Kom

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
